

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI
KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO
DALAM PILKADA 2015**

Skripsi

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Filsafat Politik Islam



PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG
K U. 2016 027 PI	: 0. 2016 / PI / 1027
ASAL E.	:
TANGGAL	:

Oleh:

HANAA NOORMANINGTYAS

E04212023

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hanaa Noormaningtyas

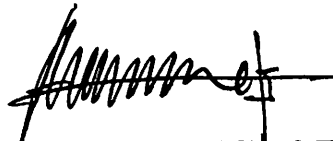
NIM : E04212023

Program Studi : Filsafat Politik Islam

Yang berjudul: “**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PILKADA 2015**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Sosial dalam bidang Politik Islam.

Surabaya, 11 Agustus 2016

Pembimbing



M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.si

NIP. 198202102009011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Hanaa Noormaningtyas ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 16 Agustus 2016

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Muhid, M. Ag.

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,

M. Anas Fakhruddin M. Si

NIP. 198202102009011007

Sekretaris,

Dr. KhoirulYahya, M. Si

NIP. 197202062007101003

Penguji I,

Dr. H.M. Ismail, M.H. M. Si

NIP. 196005211986081001

Penguji II,

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M. Si

NIP. 196811291996031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hanaa Noormaningtyas

NIM : E04212023

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI
KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO
DALAM PILKADA 2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya secara mandiri dan bukan merupakan plagiat atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 10 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Hanaa Noormaningtyas

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO DALAM PILKADA 2015

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh

Hanaa Noormaningtyas

NIM E04212023

ABSTRAK

Ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik. Teori ini bermakna partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat dengan cara mengambil bagian dalam proses pemilihan pemimpin, baik secara langsung atau tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subyek penelitian adalah Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, pemilih penyandang disabilitas dan wali penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015 tergolong dalam partisipasi aktif, karena kesadaran politik dari masyarakat sudah mulai terbangun. Meskipun telah dikatakan partisipasi aktif, sebagian dari mereka ada yang termasuk dalam partisipasi politik tidak aktif yaitu tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015, diantaranya adalah: faktor status sosial-ekonomi, faktor pengetahuan tentang calon dan juga faktor referensi politik.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, dan Pilkada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II KERANGKA TEORI

A. Partisipasi Politik	21
1. Definisi Partisipasi Politik	22
2. Relevansi Konsep Partisipasi Politik.....	26
3. Dimensi-dimensi Partisipasi Politik.....	27
4. Model dan Bentuk-bentuk Partisipasi Politik.....	29
B. Penyandang Disabilitas.....	32
1. Pengertian Disabilitas.....	32
2. Klasifikasi Disabilitas.....	35
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	38
1. Pendekatan Disposisional.....	39
2. Pendekatan Konstektual.....	43

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian.....	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Kondisi Demografis.....	46
a. Penduduk.....	47
b. Keadaan Sosial Keagamaan.....	47
c. Keadaan Sosial Budaya.....	49
d. Pendidikan.....	50
e. Ekonomi.....	52
B. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	52
C. Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	55

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	58
B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.. .	62
C. Referensi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.....	68

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel DPT Penyandang Disabilitas Kabupaten Mojokerto.....	6
3.1 Tabel Batas Wilayah Kecamatan Kemlagi.....	45
3.2 Tabel Desa-Desa di Kecamatan Kemlagi.....	46
3.3 Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kemlagi.....	47
3.4 Tabel Agama di Kecamatan Kemlagi.....	48
3.5 Tabel Sarana Peribadatan Kecamatan Kemlagi.....	48
3.6 Tabel Jumlah Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan.....	51
3.7 Tabel Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Dinas Pendidikan.....	52
3.8 Tabel Hasil Perolehan Suara Pilkada 2015 Kecamatan Kemlagi.....	53
3.9 Tabel DPT Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi.....	54
4.1 Tabel Hasil Analisis Dengan Teori Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.....	60
4.2 Tabel Hasil Analisi dengan Teori Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi pancasila, yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila, yaitu sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara Demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Mahmuzar¹, bahwa pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dengan proses pemilu diharapkan seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin. Dalam suatu negara demokrasti, pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingannya.

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 23

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 7. Pertama kali dilakukan pemilu di Indonesia adalah sejak Tahun 1955.

Sejauh ini, pemilu-pemilu tersebut dapat berlangsung dengan relatif bebas dan damai. Berdasarkan prestasi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu itu tak mengherankan bila Indonesia saat ini disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.²

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

² Robert. A. Dahl. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. (Alih bahasa: A. Rohman Zainuddin). (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). 68

22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga masuk dalam rezim pemilu.

Tepat pada tanggal 09 Desember 2015 dilaksanakan Pilkada yang serentak diikuti oleh beberapa Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, termasuk juga Kabupaten Mojokerto. Pemilihan ini bertujuan untuk mencari pengganti dari Kepala Daerah yang lalu untuk memimpin Kabupaten Mojokerto pada periode tahun 2015-2020.

Pilkada ini diikuti oleh 3 calon. Calon yang pertama adalah Choirun Nisa-Arifudinsyah, Mustofa Kemal Pasa-Pungkasiadi, dan juga Misnan Gatot-Rahma Shofiana. Namun di tanggal 3 November 2015 menurut keputusan MA (Mahkamah Agung) ada pencoretan pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 1 yaitu Cabup Choirun Nisa dan Cawabup Arifudinsyah dikarenakan pasangan calon ini tersandung masalah. Jadi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang bisa maju dalam Pilkada 2015 adalah Mustofa Kemal Pasa-Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Pilkada ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memiliki hak pilih. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Dan tidak semua manusia diciptakan sempurna, ada sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, salah satunya adalah disabilitas (*difabel/different ability*), yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.³

Istilah disabilitas atau difabel pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1996 oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, yang salah satunya adalah Mansour Fakhri. Penggunaan kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda⁴.

Dengan pengertian seperti ini diharapkan masyarakat tidak hanya memandang para kaum disabilitas sebagai manusia yang serba berkekurangan dan ketidakmampuan. Para disabilitas bukanlah manusia yang berkekurangan tapi mereka adalah manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda.

Disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus.

³ Zainul Daulay. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat. 2013. 1

⁴ Bahrul Fuad, "Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis," Cak Fu, diakses 1 Juni 2015, <http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-ideologis/>

Kelainan fisik atau mental mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuhnya, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas, termasuk kesulitan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk untuk mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dalam setiap pemilu disabilitas yang telah memenuhi hak pilih seharusnya menggunakan hak pilihnya agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka.⁵ Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 3 Desember sebagai hari penyandang disabilitas Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang penyandang disabilitas serta memberi dukungan untuk hak-hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas.

Tema acara hari penyandang disabilitas Internasional tahun 2015 yakni, Wujudkan Masyarakat Inklusif Melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Strategi Multisektoral. Dalam peringatan di Gedung S Ramelan, puluhan anak

⁵Zainul Daulay. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat. 2013, 1

penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus mempertunjukkan bakatnya mulai dari seni tari, menyanyi, band, puisi dan fashion.

Pada acara ini juga dilantik Dewan Pengurus Cabang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Mojokerto masa bakti 2015-2020 yang dilantik langsung oleh Ketua DPD PPDI Jawa Timur Adi Kurnia Juwanto. Dalam hari penyandang disabilitas Internasional, Walikota Mas'ud Yunus berharap para penyandang disabilitas akan semakin berdaya dan semakin sejahtera.

Walikota Mojokerto mengatakan, “Pemerintah pusat sedang merumuskan undang-undang bagi penyandang disabilitas, sedangkan Pemkot Mojokerto telah memiliki Perda yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Pemkot Mojokerto terus berupaya menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses semua pelayanan”.⁶Berikut ini disajikan tabel jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Mojokerto tahun 2015:

Tabel 1.1

Jumlah DPT Penyandang Disabilitas

Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna grahita	Lainnya	Total
Bangsals	4	4	1	3	5	17
Dawarblandong	12	15	17	15	7	66
Dlanggu	9	19	16	7	42	93
Gedeg	12	5	11	13	4	45
Gondang	4	10	9	4	4	31
Jatirejo	4	1	5	5	3	18
Jetis	8	20	16	3	5	52

⁶http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/253617/melalui_perda_pemkot_mojokerto_jamin_hak_penyandang_disabilitas.html , 19 Februari 2016

Kemlagi	20	8	23	18	15	84
Kutorejo	11	1	10	11	6	39
Mojoanyar	6	3	7	4	4	24
Mojosari	11	11	9	5	25	61
Ngoro	20	18	16	3	10	67
Pacet	5	11	2	3	3	18
Pungging	12	18	12	14	4	60
Puri	22	3	10	9	2	46
Sooko	15	7	7	13	5	47
Trawas	5	5	4	3	2	19
Trowulan	10	10	9	9	4	42
Total	190	163	184	142	142	821

Sumber: Data Pemilih Tetap Pilkada 2015 Kabupaten Mojokerto Online <https://pilkada2015.kpu.go.id/>

Dari paparan tabel tersebut diketahui kecamatan Kemlagi menempati urutan nomor 2 tertinggi jumlah penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hak suara politik penyandang disabilitas harus dipenuhi. Karena sekecil apapun suara penyandang disabilitas itu akan sangat berpengaruh pada hasil pemilu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam Pilkada 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada di kabupaten Mojokerto tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada di kabupaten Mojokerto tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Mendeskripsikan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada kabupaten Mojokerto.
2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala ilmu dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini adalah hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum agar mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka tentang politik terutama dalam pemilihan umum yang bersifat universal seperti Pemilu Presiden atau Pemilu Kepala Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para disabilitas untuk dapat menyuarakan aspirasi politiknya. Sedangkan bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto agar lebih memfasilitasi para disabilitas dan memberi dorongan bagi para disabilitas untuk terus menyuarakan aspirasi mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada, ditemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, dan buku yang sejalan dengan tema kajian penelitian ini. Berikut hasil usaha penelusuran tentang karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

1. Nama : Meytisen Hendra Ngongoloy (Universitas Sam Ratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan)

Judul : Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan

Hasil : Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.

Fokus penelitian tersebut adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Legislatif di Desa Temboan. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, peneliti akan meneliti tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto karena menurut disana terdata bahwa banyak penyandang disabilitas yang tinggal di kecamatan ini.

2. Nama : Syaiful Huda (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah, 2014)

Judul : Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2012
Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil

Kabupaten Pati)

Hasil penelitian: respon masyarakat desa Tegalharjo dalam pemilu 2012 Kabupaten Pati cenderung menerima hadirnya money politics. Meskipun demikian, mereka tetap mau berpartisipasi jika tidak ada money politics, hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo dalam jumlah presentase diantaranya terdapat, faktor hubungan masyarakat dengan calon (4%), faktor money politics (76%), faktor kondisi sosial ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%).

Fokus dari penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang partisipasi politik masyarakat di Desa Tegalharjo dalam pemilu 2012 yang cenderung menerima adanya money politics dalam pemilu. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan membahas tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, meskipun sama-sama membahas tentang pemilu namun tetap perbedaannya terdapat pada masyarakat yang dijadikan obyek penelitian.

3. Nama : Khoiri Yaningsih (Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, 2014)

Judul : Skripsi Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil Penelitian: Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi penyandang

disabilitas di Kabupaten Sleman belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Fokus penelitian tersebut adalah hanya membahas aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2014 di kabupaten Sleman DIY. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti lebih membahas tentang bagaimanakah partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada 2015.

4. Nama : Putu Ratih Kumala Dewi (Universitas Udayana Bali, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015)

Judul : (Prosiding Seminar Nasional) Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar.

Hasil Penelitian: KPU Kota Denpasar sudah menjalankan perannya dalam

memberikan aksesibilitas memilih bagi penyandang disabilitas. Beberapa sarana yang telah difasilitasi oleh KPUD Kota Denpasar antara lain form pendataan pemilih dengan menyertakan kode jenis disabilitas, penyediaan template suara braile di setiap TPS, serta sarana penunjang lain bagi penyandang disabilitas tuna daksa. Upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Denpasar ini disertai pula dengan sosialisasi kepada kalangan penyandang disabilitas sehingga menjadi rujukan bagi kalangan disabilitas maupun

penyelenggara pemilu di Kabupaten lain di wilayah Bali. Hanya saja, pada konteks ini KPUD Kota Denpasar mengajak partisipasi aktif masyarakat maupun keluarga untuk mendata secara akurat warga penyandang disabilitas agar mereka mau dan merasa dimudahkan dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu.

Fokus penelitian tersebut hanya membahas partisipasi politik aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar Bali. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas membahas tentang pemilu secara universal sedang penelitian ini lebih fokus pada Pilkada 2015.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang umum dilakukan untuk mencoba mengumpulkan data serta menganalisisnya. Selain itu, dengan mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai akan memudahkan untuk melakukan atau menyikapi suatu problem yang diteliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yg secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru⁷. Berdasarkan jenisnya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena ditujukan untuk menggali suatu fakta atau informasi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif adalah suatu

⁷ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), 1

prosedur penelitian yg menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yg dapat diamati.⁸

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya⁹. Berdasarkan pada definisi-definisi ini, dalam penelitian kualitatif peneliti akan terjun secara langsung terhadap informan yg diteliti, yakni KPU Kabupaten Mojokerto dan Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi.

2. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap pra lapangan ini peneliti melakukan empat kegiatan yaitu, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, meminta perizinan pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto, memilih dan memanfaatkan informasi serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini ada 3 hal yang harus dilakukan peneliti, yaitu:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperan dan mengambil serta mengumpulkan data.

⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), 129

c. Tahap Pengolahan Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengelola hasil penelitian.

d. Tahap Penyusunan Data

Adapun tahap terakhir ini adalah penyusunan penelitian, peneliti mengkombinasikan masalah yang diteliti, hal ini untuk mendukung keabsahan penelitian.

3. Sumber Data

a. Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong yaitu sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama ini dapat diperoleh ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan dan dapat dicatat melalui catatan tertulis.¹⁰

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Adapun informannya adalah:

1. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto
2. Masyarakat Disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
3. Wali masyarakat disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112

b. Sekunder

Yang kedua adalah sumber sekunder, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jadi data ini dapat diperoleh melalui buku, jurnal, koran, artikel, browsing internet, dan juga dokumentasi pribadi.

4. Alasan Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil tempat dan lokasi penelitian di Kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi adalah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada pada saat itu, terdengarnya kabar bahwa pemerintah Mojokerto memberikan jaminan untuk para disabilitas dalam pemilukada. Dari kabar tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas disana. Dan juga dilihat dari banyaknya DPT Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kemlagi adalah Kecamatan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak diantara 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari 20 Desa yang ada di Kecamatan Kemlagi, peneliti memilih 2 Desa yaitu Desa Mojojajar dan Desa Kemlagi yang jadi tempat penelitian.

Sedangkan waktu penelitian dimulai dari minggu keempat bulan April sampai minggu pertama bulan Juli.

5. Metode Pengumpulan Data

Data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, benar tidaknya data akan mempengaruhi hasil penelitian dan benar tidaknya data tergantung pada metode pengumpulan datanya. Data yang diperlukan dalam

penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan metode wawancara.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Metode Observasi

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan pokok bahasan peneliti, yakni mengenai keikutsertaan disabilitas dalam pemilu di kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Peneliti langsung terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan kepada informan mengenai partisipasi disabilitas dalam pilkada di Mojokerto.

c. Dokumentasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalau.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹² Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen tertulis dapat berupa media cetak sebagai bahan bukti yang relevan dengan penelitian, seperti koran-koran yang memuat pemberitaan tentang topik pilkada di Mojokerto.

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinas "Mixed Method"*. Bandung: Alfabeta. 2011. 231

¹² Sugiyono. 2011, *Ibid*, 240

6. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* (dituntut selaras dengan penelitian), karena penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud dari sampling ini ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi, sumber informasi, dan sumber data atau disebut juga subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk mengetahui informasi lebih dalam maka peneliti menggunakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto, Wali penyandang disabilitas, serta Masyarakat penyandang disabilitas baik laki-laki ataupun perempuan yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada di Kecamatan Kemlagi.

7. Tehnik Analisis Data

Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian.

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan tehnik triangulasi ternyata hipotesa diterima maka hipotesis akan berkembang menjadi teori.¹³

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan Reduksi Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama Reduksi data yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi, setelah data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan yang lainnya diberi nama/label.

8. Tehnik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikutserta dalam memperoleh data yang valid.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta CV, 2010, 245

- 2) Teknik keabsahan data ketekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti lebih bersifat terbuka.
- 3) Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, diskusi merupakan teknik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang ditemukan nanti masih didiskusikan dengan rekannya dan teknik keabsahan data uraian rinci.
- 4) Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci mungkin sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan.¹⁴

9. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Sugiyono memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian.

¹⁴ Lexy J. Moleong. 2007, Ibid, 327-336.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penelitian ini, maka penelitian ini akan ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I, Pendahuluan. Yang merupakan gambaran umum dan pengantar pembahasan terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kerangka Teori. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian, bagian 1) konsepsi mengenai partisipasi politik; 2) memaparkan pengertian disabilitas; dan 3) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

BAB III, *Setting* Penelitian. Yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian dan pemilihan lokasi penelitian serta proses partisipasi politik. Sehingga kemudian bisa digunakan sebagai gambaran dasar dalam menganalisa temuan.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data. Yang terdiri dari deskripsi temuan di lapangan, serta pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan dan teori.

BAB V, Penutup. Yang berisi tentang kesimpulan serta dilengkapi dengan pernyataan rekomendasi dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Partisipasi Politik

Sebelum membahas partisipasi politik lebih jauh, ada baiknya apabila menjelaskan tentang partisipasi dan politiknya itu sendiri. Berikut pengertian partisipasi dari beberapa ahli, yaitu:¹

- 1) Menurut Keith Davis, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang untuk pencapaian tujuan dan mengambil tanggung jawab di dalamnya.
- 2) Menurut Newstrom, Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok, dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan.
- 3) Menurut Sajogyo, Partisipasi adalah proses dimana sejumlah pelaku telah bermitra pengaruh dan kontrol berbagi dalam inisiatif “pembangunan”, termasuk membuat keputusan tentang sumber daya.
- 4) Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, Partisipasi koperasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam sikap pertunjukan dan mengakui peran koperasi dalam rangka meningkatkan keamanan ekonomi.

¹ <http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html>, 30 Agustus 2016, 18.16 WIB

- 5) Menurut Sastropetro, Partisipasi adalah keterlibatan, partisipasi atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan eksternal.

Jadi dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan peserta secara mental dan emosional dan fisik dalam menanggapi melaksanakan kegiatan dalam proses pembelajaran dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan mengambil tanggung jawab atas keterlibatannya.

Kemudian berikut adalah pengertian politik dari beberapa ahli, yaitu:

- 1) Menurut Gabriel A. Almond, bahwa politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa)².
- 2) Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.³

1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti “keikutsertaan”, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah

² <http://hariannetral.com/2014/09/politik-definisi-dan-pengertian-politik.html#>, 30 Agustus 2016, 19.24 WIB

³ <http://herma-putra.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html>, 30 Agustus 2016, 20.08

hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam posisinya sebagai warganegara dengan kehendak suka rela dalam segala tahapan kebijakan dan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan dalam mencapai cita-cita bangsanya.⁴

Partisipasi politik amat urgen dalam kontes dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu manapun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Artinya, setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai warga politik.⁵

Dalam hal ini peranan yang dimaksudkan di antaranya pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye, serta melakukan aksi demonstrasi, menulis di media cetak, melakukan dialog, dan sebagainya. Namun kegiatan-

⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), 43

⁵ Elly M, Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 127

kegiatan ini harus disertai dengan rasa sukarela individu atau masyarakat dalam partisipasi politik.

Secara sederhana partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum.⁶

Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga biasa (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.⁷

⁶Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013, 129

⁷ A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, 90

Ada beberapa hal substansif yang menjadi “rambu-rambu” berkenaan dengan partisipasi, yaitu:⁸

- a. *Kegiatan-kegiatan nyata*. Partisipasi politik yang termasuk kegiatan-kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- b. *Bersifat sukarela*, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (*self motion*), bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti bayang-bayang pemerintah, desakan, manipulasi.
- c. *Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat*. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
- d. *Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik*. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan.
- e. *Memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi*, yaitu keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah

⁸ Said Gatara, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, 2007, 92

sampai tingkatan yang paling tinggi; dan dari paling luas cakupannya sampai paling sempit.

2. Relevansi Konsep Partisipasi Politik

Salah satu aspek penting demokrasi adalah partisipasi politik warga negara di dalam suatu negara. Ada dua asumsi yang mendasari pemikiran ini, sebagai berikut:⁹

Pertama adalah bahwa setiap individu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik, bukan orang yang berada di luar dirinya. *Kedua* adalah partisipasi politik selalu berkaitan dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun personal. Konsep partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu melihat partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernisasi dan pembangunan.

Argumentasinya adalah bahwa modernisasi dan pembangunan merupakan keputusan politik penting yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga apapun alasannya, anggota masyarakat yang terkena dampak dari proses modernisasi dan pembangunan tersebut berhak ikut menentukan proses tersebut.

Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output modernisasi pembangunan sosio-ekonomi. Untuk melakukan partisipasi

⁹ Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013, 133

politik yang dewasa diperlukan beberapa persyaratan yang memadai dan kekayaan nasional.

Kedua pandangan tentang hubungan antara partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu tajam. Namun satu hal yang jelas dari uraian ini, yaitu partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat yang demokratis seperti sekarang ini.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa partisipasi merupakan perilaku yang berupa keikutsertaan masyarakat pada suatu aktivitas tertentu. Partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas politik. Keikutsertaan masyarakat tersebut terwujud dalam sikap dan tindakannya sebagai bentuk reaksi terhadap produk-produk politik. Ketika hendak mengambil suatu tindakan politik, seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) harus membuat tiga keputusan, yaitu (1) memutuskan bertindak ataukah tidak, (2) memutuskan arah tindakan itu, (3) memutuskan mengenai intensitas dan durasi (lamanya) tindakan politik tersebut.

3. Dimensi-dimensi Partisipasi politik

Partisipasi politik dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) partisipasi aktif, (2) partisipasi pasif, dan (3) partisipasi tidak aktif (*inactive*). Secara umum dapat dibedakan bahwa partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya “memengaruhi” proses input politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif, atau pengurus partai politik dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan

dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik pasif merupakan tindakan “melaksanakan” output politik, seperti menaati hukum, membayar pajak, dan memelihara ketertiban dan keamanan, sedangkan partisipasi politik tidak aktif merupakan tindakan untuk tidak melakukan apa-apa, seperti tidak memilih, tidak membayar pajak, tidak menaati hukum secara sengaja, tidak menghadiri kampanye politik, dan tidak aktif menjadi anggota partai politik.

Partisipasi politik input merupakan tindakan politik yang berorientasi pada input (masukan), seperti memilih dalam pemilu, kegiatan kampanye pemilihan dalam pemilu, mengadakan kontak dengan para pejabat pemerintah, dan mencari jabatan. Sedangkan partisipasi politik output merupakan tindakan yang berorientasi pada output (mendapat keluaran dari sistem politik) seperti mendapatkan pelayanan, ketertiban umum, penyelesaian konflik dan keadilan dari pemerintah ekspresif dan instrumental.

Untuk memahami konsep partisipasi politik yang lebih detail, dibawah ini akan diuraikan beberapa subordinasi partisipasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Milbarth, yaitu: (1) terbuka (*overt*) dan (2) tertutup (*covert*). Pertama, partisipasi politik terbuka adalah tindakan politik itu akan dikritik atau didukung oleh orang lain. Kedua, partisipasi politik tertutup adalah tindakan politik warga biasa yang tidak diketahui oleh publik sehingga kecil kemungkinannya untuk dibahas publik.¹⁰

¹⁰ Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013, 143

4. Model dan Bentuk-bentuk partisipasi politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: *Conventional* (menurut aturan) adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* (diluar peraturan) adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru. Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan gelombang 2, protes mahasiswa, dan terror.

Partisipasi politik juga didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik), dapat dibedakan menjadi empat model, yaitu:¹¹

- a. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif
- b. Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis)
- c. Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, partisipasi cenderung militan-radikal
- d. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif).

¹¹ Said Gatara, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, 2007, 100

Baik faktor kesadaran politik maupun faktor kepercayaan kepada pemerintah bukan merupakan variabel atau faktor-faktor yang berdiri sendiri (variabel independen). Dengan kata lain, tinggi-rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Rush dan Althoff, bentuk partisipasi politik secara berturut-turut adalah sebagai berikut¹²:

- a. *Voting* (pemberian suara)
- b. Ikut serta dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
- c. Partisipasi dalam rapat umum
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- g. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- h. Mencari jabatan politik atau administrasi
- i. Menduduki jabatan politik atau administrasi.

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joal M. Nelson mengajukan dua kriteria penjelas¹³.

- a. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.

¹² Said Gatara, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, 2007, 93

¹³ *Ibid.*, 94

- b. Intensitas, ukuran, jangka waktu dan arti penting dari kegiatan khusus itu sebagai sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi”.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klarifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:¹⁴

- a. *Kegiatan pemilihan* mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi penjabat-pejabat pemerintahan dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

¹⁴ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994. 16

- c. *Kegiatan organisasi* menyangkut partisipasi politik sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. *Mencari koneksi (contacting)* merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. *Tindak kekerasan (violence)* juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

B. Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami kecacatan fisik, kecacatan mental maupun gabungan kecacatan fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Coleridge melalui WHO mengemukakan definisi yang berbasis pada model sosial sebagai berikut¹⁵:

- a) *Impairment* (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kaki.
- b) *Disability/handicap* (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Pengertian ini sama dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat¹⁶.

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b. Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa

¹⁵ Coleridge Peter, *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 132

¹⁶ *Ibid.*, 133

kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

Istilah difabel merupakan pengindonesiaan dari kependekan istilah *different abilities people* (orang dengan kemampuan yang berbeda). Dengan istilah difabel, masyarakat diajak untuk merekonstruksi nilai-nilai sebelumnya, yang semula memandang kondisi cacat atau tidak normal sebagai kekurangan atau ketidakmampuan menjadi pemahaman terhadap difabel sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda yang mampu melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang berbeda pula. Dengan pemahaman baru itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Sebaliknya para difabel, sebagaimana layaknya manusia umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya.

2. Klasifikasi Disabilitas

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan sebagai berikut¹⁷:

a. Disabilitas fisik

1) *Tuna Netra* adalah seorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:

- a) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).
- b) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.
- c) Memiliki sisa penglihatan (*lowvision*): seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

2) *Tuna Rungu/Wicara* adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari : tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.

3) *Cacat tubuh / Tuna daksa* adalah anggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan. Tuna

¹⁷ Soemantri Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: PT Refika Cipta Aditama, 2006. 120

daksa menurut pendapat White House Conference¹⁸ berarti suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal.

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.

Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya. Dengan demikian, orang tunadaksa ini cenderung menutup diri, rendah diri, merasa tidak berdaya, merasa tidak pantas, merasa bersalah, merasa frustrasi dan benci pada dirinya sendiri.

Muhammad Effendi membagi tuna daksa dalam 2 golongan, yaitu:

- a) Tuna daksa Ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (*congenital*) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.
- b) Tuna daksa Syaraf, yaitu kelainan akibat gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah

¹⁸ Soemantri Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: PT Refika Cipta Aditama, 2006. 121

saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh sehingga jika otak mengalami kelainan, sesuatu terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental.¹⁹

b. Disabilitas mental

1. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman dan lainnya.
2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Tuna Grahita Ringan

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

b) Tuna Grahita Sedang

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal.

¹⁹ M Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 116

Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Tuna Granita Berat

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

- c. Disabilitas fisik dan mental ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaannya, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi politik dapat digunakan dua kerangka teori (pendekatan politik), sebagai berikut.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pendekatan *konstektual* (lingkungan sosial-ekonomi dan politik).

Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya), dan oleh struktur politik yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individu aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung ditentukan, bukan menentukan.

Pendekatan ini acap kali disebut pendekatan *disposisional* atau non-

²⁰Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013. 149

intensional, termasuk di dalamnya teori belajar (*learning theory*) dan teori kepribadian.

2. Pendekatan *individual-psikologis*. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak intensional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil faktor psikologis yang memengaruhi aktor politik pada peringkat bawah sadar;
- b) Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

Pendekatan yang kedua acap kali juga disebut pendekatan intensional, termasuk di dalamnya teori pembuatan keputusan (*decision-making theory*) dan juga berkaitan dengan pendekatan intensional tadi adalah pendekatan rasional, khususnya mengenai *game theory*.

1) Pendekatan Disposisional

Masalah pendekatan disposisional²¹ ini adalah mengapa seseorang

atau sekelompok orang melakukan tindakan politik, dan mengapa mereka memilih untuk melakukan tindakan politik tertentu bukan tindakan politik lainnya. Secara umum ada dua variabel utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut. *pertama*, lingkungan sosial, seperti sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik. *Kedua*, faktor kepribadian yang meliputi bawaan (*heredity*), kebutuhan dan dorongan (*need and motive*),

²¹Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013. 150

kepercayaan (*belief*), dan sikap (*attitudes*). Menurut pendekatan ini lingkungan sosial tidak memengaruhi perilaku politik secara langsung, melainkan berpengaruh melalui faktor kepribadian sebagai faktor perantara. Dalam pada itu faktor lingkungan sosial masih bisa dibagi dua, sebagai berikut:

- a) Faktor lingkungan tak langsung. Lingkungan sosial tak langsung tidak berpengaruh terhadap kepribadian secara langsung melainkan melalui faktor lingkungan langsung.
- b) Faktor sosial langsung, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. Lingkungan sosial langsung yang memengaruhi faktor kepribadian;
 2. Lingkungan langsung yang disebut situasi yang langsung memengaruhi perilaku politik.

Faktor disposisi (*predisposisi*) atau kepribadian sebenarnya masih dibagi tiga variabel, yaitu:

- a) Kepercayaan dan sikap, yang dimaksud dengan kepercayaan (*belief*) ialah kognisi-kognisi (pengetahuan dan pemahaman) yang disertai perasaan percaya (*credibility*), yang dibedakan dengan pengetahuan yang tak dipercayai. Jadi, kepercayaan ini bisa benar atau salah, tetapi kepercayaan yang salah tetap merupakan kepercayaan. Sebab kebenaran atau kesalahan, suatu kepercayaan secara logika bebas dari kepastian psikologi mempunyai

kepercayaan. Hubungan kepercayaan ini dengan perilaku politik sangatlah jelas, yaitu apa yang dipercayai oleh seseorang sering kali merupakan determinan apa yang mereka lakukan dan apa yang menjadi sikapnya. Tetapi, tentu saja antara kepercayaan dengan sikap tidak selalu harus terdapat konsistensi.

Yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan baik suka maupun tidak suka (*like and dislike*) terhadap suatu objek. Seseorang mungkin merasa berkewajiban untuk melihat dalam pemilihan umum atau merasa senang untuk berdiskusi mengenai politik. Dari segi basis fungsional sikap dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:²²

- 1) *Kepentingan*, artinya sikap merupakan fungsi kepentingan, yaitu penilaian terhadap suatu objek diberikan berdasarkan motivasi, minat, dan kebutuhan si aktor;
- 2) *Penyesuaian diri*, yaitu sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya sikap merupakan manifestasi keinginan untuk sama atau tidak sama dengan sekelompok panutan atau tokoh yang disegani dalam lingkungan tidak langsung (pemerintah, pers, pengusaha, dan lain sebagainya). Dalam lingkungan sosial langsung (orang tua, alim ulama, sahabat dan keluarga dekat lainnya);
- 3) *Eksternalisasi dan pertahanan diri*, yaitu sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap

²²Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013. 151

seseorang merupakan upaya mengatasi konflik batin atau tekanan psikis dalam yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor*.

- b) Kebutuhan dan dorongan. Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi lima, yaitu: (1) kebutuhan fisik (makanan, air, tidur); (2) keselamatan (tertib dan lingkungan yang dapat diramalkan); (3) cinta, afeksi, dan rasa memiliki; (4) penghargaan atas diri (*self esteem*); dan (5) aktualisasi diri. Beberapa dari di antara kebutuhan ini, khususnya kebutuhan fisik-biologis naik turun secara siklus. Pada waktu kebutuhan fisik-biologis sangat diperlukan, organisme menjadi semakin berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan itu.
- c) *Heredity* (bawaan). Jika kebutuhan fisik-biologis ini telah dipenuhi secara rutin, maka organisme dapat beralih ke perilaku sosiopolitik.

Kebutuhan-kebutuhan di atas sebagian dikembangkan dari bawaan dan sebagian lagi dari lingkungan sosial langsung (sosialisasi dari lingkungan).

Berkaitan dengan pendekatan disposisional, bahkan barangkali merupakan penyederhaan dari model diatas, beberapa ahli melihat faktor kesederhaan politik dan sikap dan kepercayaan terhadap pemerintahan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik. Kesadaran politik diartikan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan

seseorang tentang lingkungan sosial politik, dan minat serta perhatiannya akan lingkungan sosiopolitik sikap dan kepercayaan seseorang terhadap sistem politik, khususnya terhadap pemerintah diartikan sebagai penilaian orang tersebut terhadap pemerintah; dipercaya atau tidak dan disukai atau tidak disukai.

Menurut Jerry M. Paige²³ berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut partisipasi dibagi menjadi empat tipe. Kalau seseorang mempunyai kesadaran politik dan sikap kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka partisipasinya akan bersifat aktif. Apabila seseorang mempunyai kesadaran politik dan kepercayaan rendah, maka partisipasi politiknya akan bersifat apatis. Tipe partisipasi yang ketiga adalah militan-radikal, yaitu apabila orang tersebut mempunyai kesadaran politik yang tinggi tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah. Akhirnya, apabila seseorang mempunyai kesadaran politik yang rendah, tetapi mempunyai sikap dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, maka partisipasi yang demikian disebut pasif.

2) Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku sikap dan perilaku seseorang individu dalam masyarakat ditentukan oleh lingkungan sosio-ekonomi dan politik masyarakat tanpa individu tersebut hidup. Pendekatan ini cenderung melihat individu sebagai tidak otonom terhadap pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini adalah antara

²³Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik*, 2013. 154

lain status sosial, status ekonomi, kelas, subkultur dan tipe rezim yang berkuasa dalam suatu masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id Status sosial dan ekonomi merupakan suatu rujukan kelompok yang penting bagi banyak orang karena banyaknya ikatan yang menghubungkan mereka dengan status tersebut. Yang menjadi indikator status sosial antara lain pekerjaan dan pendidikan; sedangkan indikator status ekonomi antara lain pendapatan, pengeluaran, pemilikan dan penguasaan tanah, ataupun pemilikan barang-barang berharga. Orang yang mempunyai status sosial yang tinggi belum tentu mempunyai status ekonomi yang tinggi.

Kelompok masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah biasanya mempunyai partisipasi politik yang rendah pula. Hal ini disebabkan kelompok masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang rendah tidak mempunyai waktu bebas yang memadai untuk kegiatan politik, tidak mempunyai jaminan ekonomi sehingga merasa tak mampu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berbuat sesuatu terhadap lingkungan politik, kurang akses pada informasi dan alternatif, dan kemungkinan untuk rugi dari keputusan politik bagi kelompok ini lebih rendah daripada ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang berstatus sosial dan ekonomi yang tinggi dari keputusan politik.

BAB III

SETTING PENELITIAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Deskripsi Umum Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Geografis adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan.

Kecamatan Kemlagi adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang terletak pada ketinggian antara 43 meter sampai dengan 49 meter diatas permukaan air laut. Berikut adalah batas wilayah Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Batas Wilayah Kecamatan Kemlagi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Batas	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Dawarblandong	Mojokerto
Sebelah Selatan	Jetis	Mojokerto
Sebelah Timur	Gedeg	Mojokerto
Sebelah Barat	Ngusikan	Jombang

Sumber: Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015

Luas wilayah Kecamatan Kemlagi adalah 3.926 Km², yang terdiri dari 2.965, Km² lahan pertanian dan non pertanian, 960,7 Km², lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Kemlagi terbagi menjadi 20 Desa, yaitu:

Tabel 3.2
Desa-Desa di Kecamatan Kemlagi

No.	Desa	No.	Desa
1.	Watesprojo	11.	Mojokusumo
2.	Betro	12.	Japanan
3.	Kedungsari	13.	Mojokumpul
4.	Berat Kulon	14.	Tanjungan
5.	Mojojajar	15.	Mojorejo
6.	Mojosarirejo	16.	Mojodadi
7.	Mojowiryono	17.	Kemlagi
8.	Mojowatesrejo	18.	Mojowono
9.	Mojogebang	19.	Pandankrajan
10.	Mojopilang	20.	Mojodowo

Sumber: Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015

Secara administratif, Kecamatan Kemlagi mempunyai 145 Rukun Warga (RW), 371 Rukun Tetangga (RT), serta mempunyai 77 Lingkungan/Dusun.

2. Kondisi Demografis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Demografis atau kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan

distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

a. Penduduk

Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk akhir tahun menurut jenis kelamin berdasarkan hasil registrasi penduduk (WNI+WNA) dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kecamatan Kemlagi

Jumlah Laki-laki	28.930 Jiwa
Jumlah Perempuan	29.254 Jiwa
Jumlah Total	58.184 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	15.580 Jiwa

Sumber : Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015

Dari tabel di atas, bisa diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Kemlagi terbilang lumayan banyak. Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kemlagi menurut jenis kelamin yakni 58.184 jiwa. Yang diantaranya laki-laki terdapat 28.930 jiwa, dan perempuan 29.254 jiwa.

b. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk Kecamatan Kemlagi sebagian besar beragama Islam, tapi juga terdapat beberapa agama lain yang dianut disana. Dapat dilihat agama-agama yang dianut dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Agama di Kecamatan Kemlagi

Agama	Jumlah
Islam	58.238 orang
Kristen Protestan	5 orang
Kristen Katolik	687 orang
Hindu	8 orang
Budha	7 orang

Sumber: *Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015*

Salah satu kewajiban bagi seluruh warga Indonesia untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan lima agama yang diakui oleh negara Indonesia dan satu aliran penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sedangkan sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Sarana Peribadatan Kecamatan Kemlagi

Jenis Sarana	Jumlah
Masjid	40
Langgar/Musholla	147
Gereja/Kapel Protestan	5

Sumber: *Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015*

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa kehidupan beragama di Kecamatan Kemlagi, baik antar umat beragama, antar sesama agama dan umat beragama dengan sesama agama, demikian juga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpelihara

dengan baik, dapat hidup berdampingan, saling toleransi, saling bantu dan saling berupaya untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Terciptanya kedamaian itu dilatarbelakangi oleh warga yang mayoritas saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Problem sekecil apapun yang timbul di dalam keseharian mereka dapat terpecahkan sehingga tidak sampai menimbulkan problema yang lebih besar.

Dalam aspek budaya keagamaan yang dianut masyarakat Kecamatan Kemlagi mayoritas kultur Nahdlatul Ulama. Hal ini sesuai dengan masyarakatnya yang berbasis NU maka kultur dan tradisi keagamaan yang muncul disana adalah NU. Kultur dan tradisi keagamaan NU yang selalu dilakukan oleh masyarakat Kemlagi adalah kegiatan Tahlilan, hanya saja ada tambahan lagi kegiatan keagamaan di desa Giri dan sekitarnya diantaranya Jam'iyah Diba', Khotmil Qur'an, Imtihan, Dan Maulud.

c. Keadaan Sosial Budaya

Tempat penelitian yang penulis jadikan obyek kajian untuk mengetahui partisipasi politik Kecamatan Kemlagi. Kecamatan Kemlagi adalah sebuah Kecamatan yang terletak di ujung Barat Kabupaten Mojokerto. Secara teritorial, Kecamatan Kemlagi berada di bawah pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Di Kecamatan Kemlagi masih terdapat budaya Jawa yang sudah jarang sekali ditemui, yaitu Ludruk, Wayang Kulit, Kuda Lumping dan

lain-lain. Pada zaman dahulu sekitar Tahun 1980-an, kecamatan ini masih sangat terlihat asri dan sejuk. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya perekonomian disana yang mengharuskan banyak didirikan pemukiman penduduk yang membuat suasana terasa kurang asri lagi. Terdapat beberapa tempat wisata yang berada di Desa Tanjungan yang dinamakan Danau Tanjungan. Selain Danau Tanjungan terdapat pula Sendang Kewarasan yang juga terletak di Desa Tanjungan yang konon menurut cerita masyarakat sekitar airnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang¹.

Sekolah adalah tempat didikan bagi anak anak. tujuan dari sekolah adalah mengajar tentang mengajarkan anak untuk menjadi anak yang

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan> diakses tanggal 21 Juli 2016, 21:39

mampu memajukan bangsa. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru².

Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara (dibahas pada bagian Daerah di bawah), tetapi umumnya termasuk sekolah dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Saat ini di Kecamatan Kemlagi terdapat beberapa gedung sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, SD (Sekolah Dasar) dan lain-lain, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid
Taman Kanak-kanan (TK)	23	1.288
Sekolah Dasar (SD)	25	3.344
SLTP	6	1.437
SMU/SMK	5	2.058

Sumber: Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015

Selain data jumlah sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, ada juga data jumlah sekolah yang di luar Dinas Pendidikan, yaitu:

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah> diakses tanggal 22 Juli 2016 10:56

Tabel 3.7

Jumlah Sekolah di Luar Lingkungan Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid
Roudlotul Athfal (RA)	8	611
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	10	1.901
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4	1.718
Madrasah Aliyah (MA)	1	335

Sumber: Buku Kecamatan Kemlagi dalam Angka 2015

Selain sekolah-sekolah yang disebutkan dalam data di atas, ada sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Selama melakukan penelitian penulis melihat ada sebuah Sekolah Luar Biasa yang disebut SLB di Kemlagi. SLB tersebut sudah berdiri cukup lama untuk membantu para penyandang disabilitas dalam hal pendidikan.

e. Ekonomi

Terdapat beberapa mata pencaharian di Kecamatan Kemlagi yang menjadi pekerjaan pokok bagi warga di sini diantaranya yaitu petani, pedagang, sopir, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter, bidan, perawat dan juga karyawan perusahaan swasta. Akan tetapi yang banyak terlihat di Kecamatan Kemlagi adalah petani dan pedagang.

B. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi

Kabupaten Mojokerto

Partisipasi politik dipahami sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Tabel 3.8
Hasil Perolehan Suara Pilkada 2015
Kecamatan Kemlagi

Pemilih	Pegguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
		48.838	31.008
		Misnan & Rahma Shofiana W.A	5.120 suara

Sumber: Data online KPU Kab. Mojokerto 2015

Di Kecamatan Kemlagi terlihat bahwa yang memegang suara paling banyak adalah pasangan H. Mustofa Kamal Pasa dan H. Pungkasiadi yaitu 23.664 suara, sedangkan perolehan dari pasangan Misnan dan Rahma Shofiana yang hanya berjumlah 5.120 suara saja. Dari jumlah pemilih 48.838 orang yang menggunakan hak pilihnya hanya ada 31.008 orang saja. Namun dari jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, ada surat suara yang tidak sah yang berjumlah 2.224 surat suara.

Sudah dipaparkan diatas tentang pengertian partisipasi politik, dari pemahaman tersebut bisa diartikan bahwa setiap individu atau sekelompok orang yang secara aktif dalam bidang politik dengan cara ikut serta dalam pemilihan pemimpin. 7 (tujuh) bulan yang lalu tepatnya pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disebut dengan Pilkada yang dilakukan oleh seluruh warga di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, termasuk juga penyandang disabilitas (penyandang cacat).

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki gangguan fisik/mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan

munculnya hambatan atau kesulitan dalam melakukan mobilitas. Meskipun begitu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia sempurna. Namun tetap saja masih ada saja kendala meskipun hanya sedikit.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat, pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Dari UU tersebut sudah sangat jelas apabila penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.

Dan juga pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Itu artinya penyandang disabilitas masih sangat berkewajiban menyalurkan hak politiknya berupa menggunakan hak pilih pada setiap pemilu yang diselenggarakan di setiap daerah masing-masing.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 3.9

DPT Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi

No.	Jenis Disabilitas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tuna Daksa	16	4	20
2	Tuna Netra	3	5	8
3	Tuna Rungu/Wicara	11	12	23
4	Tuna Grahita	8	10	18
5	Disabilitas Lainnya	7	8	15
Jumlah		45	39	84

Sumber: Data DPT KPU Kab. Mojokerto 2015

Jika dilihat data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi tergolong banyak. Meskipun dalam data tersebut terdapat banyak penyandang disabilitas yang terdaftar menjadi Daftar Pemilih Tetap atau yang biasa disebut DPT namun belum tentu semua dari mereka menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Dalam data yang diperoleh peneliti dari KPU Kab. Mojokerto ialah penyandang disabilitas yang terdata menyalurkan suara dalam pilkada Tahun 2015 ini hanya sebanyak 12 orang saja. Jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Kemlagi.

C. Pelaksanaan Pilkada Bagi Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Secara menyeluruh pilkada tahun 2015 telah sukses dilaksanakan. Meski beberapa bulan sebelum tanggal yang ditetapkan untuk mencoblos ada sedikit masalah yaitu calon nomor satu pasangan Choirun Nisa-Arifudinsjah harus dicoret dari pencalonan. Namun permasalahan itu tidak membuat masyarakat memilih untuk golput.

Persiapan dari KPU Kabupaten Mojokerto untuk pilkada tahun 2015 ini adalah³: *pertama*, pengalokasian hibah daerah. Hibah daerah ini adalah hibah dari kabupaten untuk daerah-daerah di kabupaten Mojokerto. Yang alhamdulillah mendapatkan hibah sebesar 30 M. *Kedua*, melakukan penyusunan tahapan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) yang sudah diratifikasi menjadi program kegiatan

³ Wawancara dengan pak Ayuhan Nafik selaku Ketua KPU Kabupaten Mojokerto di Kantir KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 Juni 2016 pukul 10.22 WIB

dan tahapan pilkada Mojokerto tahun 2015 sebagai acuan untuk pelaksanaan Pilkada.

Untuk mengurangi angka golput KPUD Mojokerto melakukan 3 cara yaitu: *pertama*, sosialisasi yang masif kepada masyarakat. *Kedua*, mengajak masyarakat dan organisasi-organisasi agar terlibat di dalamnya. *Ketiga*, mengefektifkan pemberitaan melalui media-media tradisional seperti ledang atau keliling-keliling pada masyarakat untuk mau ikut andil menyuarakan hak politiknya pada pilkada dan juga meminta tolong kepada takmir-takmir masjid untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pada tanggal yang sudah ditentukan akan dilakukan pencoblosan. Dengan cara seperti itu diharapkan masyarakat ikut serta dalam pilkada.

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Mojokerto kepada masyarakat, KPUD juga memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang bekerja sama dengan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia). Sosialisasi untuk penyandang disabilitas hanya berfokus kepada tuna netra, karena menurut KPUD penyandang disabilitas lah yang lebih butuh sosialisasi disebabkan oleh keterbatasan penglihatan. Alat peraga yang digunakan KPUD untuk sosialisasi kepada tuna netra adalah Template yang ada huruf braille.

Lalu untuk penyandang disabilitas lain seperti tuna daksa, tuna rungu/wicara tidak begitu membutuhkan sosialisasi. Padahal pada nyatanya, tuna rungu/wicara juga membutuhkan sosialisasi seperti yang dilakukan KPUD untuk tuna netra. Tuna rungu/wicara memang terlihat bisa mengerti tentang pemilu namun realitasnya tidak demikian. Keterbatasan yang dimiliki tuna rungu/wicara

seharusnya mendapat perhatian juga dari KPUD, karena tuna rungu/wicara meskipun mereka penglihatan normal tapi pada saat diajak berkomunikasi harus dengan memeragakan yang dilakukan.⁴ Tuna tungu/wicara memang ikut serta dalam pemilu namun bukan berarti mereka sepenuhnya memahami apa yang dinamakan pemilu.

Salah satu masyarakat Desa yang terletak di Kecamatan Kemlagi mengungkapkan bahwa masih saja ada praktik politik uang yang terjadi. Menurut salah satu masyarakat, yang mendapat sogokan uang itu hanya warga yang menjadi tim sukses dari calon tersebut.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴ Nurul, *Wawancara*, SLB di Kemlagi, 2 Juni 2016

⁵ <http://realita.co/index.php?news=Per-Kepala-Diberi-Rp-20-Ribu-agar-Coblos-Nomor-2> , diakses pada tanggal 03 Mei 2016 14:17 WIB

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada 2015. Hasil penelitian yang didapat dari wawancara di lapangan dengan informan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dari judul penelitian.

A. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pada pilkada serentak yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2015 di Kecamatan Kemlagi dan hasilnya diumumkan secara resmi oleh KPU Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 Desember 2015 menunjukkan bahwa yang menjadi Bupati dan Wakil bupati adalah pasangan H. Musthofa Kamal Pasa dan H. Pungkasiadi.

Dalam terpilihnya pasangan H. Musthofa Kamal Pasa tidak lepas dari peran penyandang disabilitas yang ikut serta berpartisipasi dalam pilkada. Disini peneliti paparkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yang bernama saudara Rokhman yang dilakukan di rumahnya Desa Mojojajar pada pukul 11.24 WIB, yang menyatakan bahwa:

"iya mbak, saya ini selalu antusias dalam mengikuti pemilu. Pemilu apapun saya juga ikut menyalurkan hak suara. Saya kan memiliki hak pilih, jadi ya digunakan mbak. Di TPS juga saya tidak mendapat kendala, semuanya lancar mbak. Saya seperti ini juga sudah sejak tahun 2005 mbak, jadi kalau untuk berangkat ke TPS tidak perlu ada yang mendampingi karena memang bisa mengatasi sendiri mbak waktu disana".¹

¹ Rokhman, *Wawancara*, Mojojajar, 1 Juni 2016

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rokhman bisa dijelaskan bahwa beliau memang memiliki rasa peduli yang cukup tinggi terhadap dunia politik dengan selalu antusias dalam mengikuti pencoblosan di tempat pemungutan suara atau yang biasa disebut dengan TPS. Beliau juga mengatakan pada saat di TPS atau pada saat berlangsungnya pencoblosan tidak ada kendala aksesibilitasnya, lancar sekali bahkan beliau datang ke TPS tidak perlu bersama pendamping.

Selain saudara Rokhman adapula penyandang disabilitas yang peneliti wawancarai yaitu saudari Yuliana di rumahnya Desa Kemlagi pada pukul 08.39 WIB, namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai orang tuanya selaku wali/pendamping pada saat pencoblosan berlangsung. Adapun pernyataan dari wali dari mbak Yuliana sebagai berikut:

*“Yuliana ini pada saat ada pemilu selalu nyoblos. Karena ya memang sudah memiliki hak pilih mbak. Selalu saya yang mendampingi dia, ya memang karena alasan keterbatasannya ini tadi mbak. Soalnya jarang ada yang bisa berbicara dengannya kan dia bicarannya susah mbak”.*²

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua saudari Yuliana dapat dijelaskan bahwa ia termasuk orang yang aktif ikut berpartisipasi dalam pemilu meskipun tetap harus didampingi ketika di TPS dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh saudari Yuliana.

Selain dari 2 penyandang disabilitas diatas ada lagi yang peneliti wawancarai yaitu saudari Sriana yang bertempat di rumahnya Desa Kemlagi pada pukul 10.11 WIB, berikut pemaparan dari saudari Sriana:

² Yuliana, *Wawancara*, Kemlagi, 2 Juni 2016

“Kalau mbak tanya apa saya selalu antusias, ya jelas saya selalu antusias. Meskipun saya tidak memiliki alasan untuk mencoblos tapi itu merupakan hak saya sebagai warga negara. Sudah menjadi keharusan mbak. Saya kesana juga selalu harus ada yang mendampingi karena saya tidak bisa melihat. Untuk akses selama di TPS bisa dikatakan sudah cukup memadai.”³

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Sriana dapat dijelaskan bahwa beliau termasuk orang yang aktif ikut berpartisipasi dalam pemilu meskipun tetap harus ada yang mendampingi dikarenakan beliau adalah tuna netra. Meskipun beliau sendiri mengatakan bahwa tidak ada alasan tapi beliau tetap menggunakan hak pilihnya dikarenakan itu adalah suatu keharusan sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemilu yang ada di Indonesia. Menurut beliau akses di TPS juga sudah memadai bagi penyandang disabilitas terutama bagi tuna netra. Berikut hasil analisis yang dihubungkan dengan teori:

Tabel 4.1
Hasil Analisis dengan Teori
Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas

No.	Informan	Data	Teori
1.	Rokhman (Tuna Daksa, 50 tahun, SMA, tidak bekerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Antusias Tinggi • Menggunakan hak pilih • Sadar memiliki hak pilih 	Herbert Micklosky karena ia dengan sukarela mengikuti proses pencoblosan
2.	Yuliana (Tuna rungu/wicara, 25 tahun, SLB, tidak bekerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan hak pilih • Didampingi pada saat pemilu 	Herbert Micklosky karena kagiatan memilih yang dilakukan adalah sukarela tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menggunakan hak pilih.
3.	Sriana (Tuna netra, 47 tahun, tidak bekerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menggunakan hak pilih • Karena memiliki hak pilih 	Herbert Micklosky karena ia tidak ingin menyia-nyaiakan hak pilih yang dimilikinya.

³Sriana, *Wawancara*, Kemlagi 2 Juni 2016

Ketiga penyandang disabilitas ini termasuk dalam teori partisipasi politik Herbert Miclosky, yaitu partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Artinya, masyarakat penyandang disabilitas sudah cukup mengerti bahwa memang seharusnya mereka tidak menyia-nyiakan hak politik yang mereka miliki. Karena kegiatan mereka dengan cara ikut serta dalam proses pemilihan penguasa/pemimpin termasuk dalam kegiatan partisipasi politik.

Salah satu aspek terpenting dalam demokrasi adalah partisipasi politik warga negara dalam suatu negara. Terdapat pula dua asumsi yang mendasari pemikiran ini, yang pertama adalah setiap individu warga negara adalah pihak yang paling mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik. Dan kedua adalah partisipasi politik selalu berkaitan dengan kebijakan publik baik yang menyangkut masyarakat banyak maupun personal.

Partisipasi politik penyandang disabilitas Kecamatan Kemlagi nampak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tidak terlalu tinggi jika dilihat dari data KPU Kab. Mojokerto yaitu hanya sebanyak 12 suara, padahal jika dilihat dalam data DPT dari KPU ada sejumlah 84 orang yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar menjadi DPT di Kecamatan Kemlagi. Meskipun jumlah yang tercatat oleh KPU hanya ada 12 orang, namun partisipasi masyarakat penyandang disabilitas tergolong partisipasi aktif yaitu masih mau ikut serta dalam proses pemilu yang berlangsung.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas adalah kesadaran diri masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Selain kesadaran diri yang dimiliki, ada pula faktor lain yang berpengaruh yaitu dari lingkungan keluarga atau bisa disebut dengan referensi politik.

Disini peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas yang bernama saudari Muthosia yang dilakukan di rumahnya Desa Kemlagi pada pukul 10.50 WIB:

“iya mbak, saya nyoblos. Kata orang di kelurahan disuruh nyoblos ya nyoblos. Saya cuma tau tentang calonnya sekedarnya aja, kata orang-orang baik ya saya pilih sama kayak orang-orang mbak tapi juga dari awal di rumah suami sudah ngasih tau siapa yang harus dipilih. Pas juga yang dibilang orang-orang dan suami sama jadi ya lebih enak mbak, nggak mikir-mikir lagi mau milih siapa.”⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Muthosia dapat dijelaskan bahwa beliau memilih karena dari kelurahan memberikan sosialisasi untuk mencoblos pada tanggal yang sudah ditentukan. Alasan beliau memilih adalah karena banyak dari warga sekitar yang mengatakan bahwa salah satu calon adalah baik dan juga suami beliau juga menyarankan untuk memilih calon yang dikatakan oleh warga sekitar, disamping itu juga beliau memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

Selain saudari Muthosia peneliti juga mewawancarai saudari Purwanti di rumahnya di Desa Mojojajar pada pukul 10.35 WIB, tetapi bertepatan dengan

⁴Muthosia, *Wawancara*, Kemlagi, 2 Juni 2016

setiap pemilu, tapi untuk pilkada tahun 2015 ia mencoblos. Ia juga mengatakan walaupun ia mencoblos nantinya tidak akan ada pengaruhnya untuk dirinya sendiri. Faktor lainnya adalah ia menganggap bahwa tidak akan berpengaruh apapun meskipun ia selalu menggunakan hak pilihnya, karena baginya ia hanya rakyat biasa yang berada di bawah.

Ada seseorang disabilitas yang menurut peneliti sedikit berbeda dengan para disabilitas yang sebelum-sebelumnya peneliti wawancarai. Beliau bernama Sutaji yang bertempat di rumah beliau Desa Kemlagi pada pukul 13.00 WIB, berikut pemaparannya:

*"iya mbak, saya tentu nyoblos. Motivasi saya mencoblos itu yang saya lihat dari calonnya adalah figurnya seperti apa, hasil gunanya, persuasif buat masyarakat, greget kemajuan pembangunan yang punya motif. Allah juga menyuruh hambanya untuk memilih pemimpin yang membawa manfaat. Menurut saya memilih seorang pemimpin itu yang harus dilihat adalah agama, harta, ilmu, kepedulian terhadap masa depan. Orang yang patut dipertimbangkan untuk dipilih menjadi pemimpin. Saya menggunakan hak pilih karena memang memiliki hak pilih yang sama seperti masyarakat lainnya, jadi suatu keharusan bagi saya untuk menyuarakan hak pilih saya. Pernah suatu ketika ada dari tim sukses dari calon yang datang memberikan sejumlah uang untuk saya sekeluarga. Uang bukan menjadi alasan saya mencoblos, seberapa banyak pun uang yang diberikan apabila saya tidak tertarik untuk memilih calonnya ya saya tidak akan pilih mbak."*⁷

Dari hasil wawancara dengan saudara Sutaji dapat dijelaskan bahwa beliau termasuk seseorang yang aktif ikut dalam berpartisipasi politik. Dapat dikatakan aktif karena beliau selalu menggunakan hak pilihnya dalam setiap pemilu. Beliau juga memiliki pengetahuan politik yang lebih daripada yang lain, itu terlihat dari bagaimana beliau menjelaskan apa yang memotivasinya dalam pemilu.

Faktor lainnya adalah tidak adanya referensi politik dari siapapun termasuk dari keluarganya. Beliau tidak mau menerima setiap referensi yang

⁷Sutaji, *Wawancara*, Kemlagi, 2 Juni 2016

beliau dapatkan dari orang lain, disini dapat diartikan bahwa beliau cukup memiliki rasa percaya diri bahwa calon yang dipilihnya adalah memang terbaik, meski ada beberapa dari masyarakat yang berbicara negatif tentang pilihannya.

Jarang-jarang ada penyandang disabilitas yang seperti beliau, yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi tentang bagaimana calon pilihannya. Pengetahuan dan pemahaman politik yang beliau miliki membuatnya selalu menyalurkan suaranya. Berikut hasil analisis yang dihubungkan dengan teori:

Tabel 4.2

Hasil Analisis dengan Teori

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

No.	Informan	Data	Teori
1.	Muthosia (Tuna daksa, 49 tahun, SMA, ibu rumah tangga)	<ul style="list-style-type: none"> • Referensi politik dari suami dan warga • Memiliki kesadaran penuh siapa yang akan dipilih 	Jerry M. Paige. Partisipasi yang bersifat militan-radikal yaitu yang mempunyai kesadaran politik tinggi tetapi kurang percaya dengan pemerintah
2.	Purwanti (Tuna Daksa ortopedi, 26 tahun, tidak bekerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Referensi politik dari keluarga dekat • Untuk mencari pemimpin yang bertanggung jawab dan peduli kepada rakyatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan individual-psikologis artinya memiliki kesadaran penuh dalam menggunakan hak pilih. • Faktor disposisi/kepribadian yang ada dalam variabel kepercayaan dan sikap. Masuk dalam sikap penyesuaian diri. Sikap ini merupakan sikap yang menunjukkan keinginan untuk sama atau tidak dengan sekelompok tokoh yang disegani dalam lingkaran

			langsung yaitu keluarga dekat.
3.	Suwanta (tuna daksa, 33 tahun, rental PS)	<ul style="list-style-type: none"> • Sekedar mencoblos tanpa tujuan • Tidak selalu menggunakan hak pilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor tidak memiliki tujuan, tidak memiliki alasan termasuk dalam pendekatan individual-psikologis, yaitu perilaku politik yang tidak sadar akan tujuannya. • Faktor lain yang menganggap bahwa tidak akan berpengaruh apapun meskipun menggunakan hak pilihnya, karena baginya ia hanya rakyat biasa yang tidak memiliki kedudukan. • Faktor ini termasuk dalam pendekatan konstektual yang berarti sikap dan perilakunya ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
4.	Sutaji (tuna daksa, 51 tahun, tidak bekerja)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktif berpartisipasi politik • Selalu menggunakan hak pilihnya dan pengetahuan politik yang lebih banyak daripada disabilitas lainnya • Tidak menerima saran sebagai referensi politik ketika mencoblos 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang sesuai adalah pendekatan individual-psikologis yang melihat perilaku politik sebagai usaha sadar dalam memilih pemimpin. Melihat figur calon, hasil gunanya selama di dunia politik, dan juga memajukan pembangunan terlihat secara nyata. • Motivasi itu menunjukkan kepedulian terhadap sosio-politik. • Faktor referensi politiknya termasuk faktor disposisi atau kepribadian yang ada dalam variabel kepercayaan dan sikap

			karena beliau memiliki pengetahuan dan pemahaman yang disertai rasa percaya diri terhadap calon yang dipilihnya.
--	--	--	--

Keempat penyandang disabilitas ini menunjukkan bahwa memang beberapa dari mereka ada yang tidak memiliki motivasi yang jelas ketika menggunakan hak pilihnya. Padahal motivasi itu seharusnya sudah ada dari dalam dirinya, agar tidak hanya faktor asal-asalan pada saat memilih dalam pemilu.

Ada yang memang telah memiliki calon yang sudah dijagokan sejak awal, tapi juga masih ada juga yang hingga menjelang hari pencoblosan belum memiliki calon yang akan dipilihnya. Itu yang membuat mereka sering bersifat apatis, yaitu memilih asal-asalan.

Selain dari 7 orang di atas, ada 4 orang yang peneliti juga temui. Tetapi peneliti tidak melakukan wawancara secara mendalam, dikarenakan mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada. 4 orang tersebut terdiri dari 3 tuna grahita dan 1 tuna rungu/wicara. 3 orang tuna grahita tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki, sedang seorang lagi tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki keinginan untuk mencoblos.

Partisipasi politik dari 4 orang tersebut termasuk dalam partisipasi politik pasif. Disebut partisipasi politik pasif karena mereka tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan KPU.

C. Referensi Politik Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi

Referensi adalah rujukan suatu untuk informasi yang dilakukan seseorang atau pustakawan untuk membantu seseorang mendapatkan informasi⁸. Jadi referensi politik merupakan sebuah rujukan atau saran yang diterima masyarakat dari beberapa pihak tentang informasi mengenai calon pemimpin. Yang disebut pihak lain misalnya dari pihak keluarga, teman, tetangga, orang yang dipercaya dan juga orang yang berpengaruh di lingkungan tempat tinggal.

Kasus tentang referensi politik memang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat luas. Ada sebagian orang yang sering menjadi pemberi saran kepada masyarakat lainnya untuk mencoblos calon yang dia jagokan. Sebagian masyarakat yang belum memiliki calon untuk dipilih tentu akan mempertimbangkan bagaimana saran dari orang lain. Tetapi bagi masyarakat yang sudah memiliki calon, tidak akan menggunakan saran/referensi politik dari orang lain.

Di beberapa desa ditemukan bahwa orang yang berpengaruh di lingkungan menjadi pihak yang bisa memberikan referensi pilihan politik kepada masyarakat sekitar. Orang berpengaruh disini bisa dari berbagai kalangan yang berbeda-beda. Apabila di satu desa tersebut terdapat sebuah pondok pesantren, yang menjadi orang berpengaruh adalah Pemimpin pondok pesantren. Jika tidak ada pondok pesantren, para aparatur desa juga bisa dianggap sebagai pihak yang dapat dipercaya.

⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-referensi/> , diakses tanggal 17 Agustus 2016 , 18.53 WIB.

Dari beberapa orang penyandang disabilitas yang telah di wawancarai, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak menerima referensi politik dari siapapun karena memang mereka telah mempercayai bahwa pilihannya adalah yang terbaik menurutnya walaupun ada yang mengatakan sebaliknya.

Meski begitu, beberapa juga mengatakan bahwa mereka tidak menerima saran dari orang lain yang tidak terlalu dekat dengannya. Dalam hal ini yang berperan penting sebagai referensi politik bagi penyandang disabilitas adalah keluarga dekat mereka, karena memang mereka lebih bisa mempercayai keluarga dekat daripada orang lain. Namun diantara penyandang disabilitas yang memilih untuk menerima referensi politik dari keluarga, masih saja ada yang menerima referensi dari orang lain yang tidak begitu dekat dengannya.

Disamping itu tetap ada saja beberapa penyandang disabilitas yang tidak memiliki pilihan. Ketidaktahuan tentang calon yang membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk mencoblos pada saat pemilu. Jika sudah begitu mereka akan dengan mudah menerima referensi politik dari orang lain seperti halnya pernyataan saudari Muthosia (Tuna Daksa) bahwa beliau memilih berdasar referensi dari orang lain⁹. Selain saudari Muthosia, ada saudari Sriana (Tuna Netra) yang juga menggunakan referensi politik dari keluarga dekatnya yang memang telah dipercayai.

⁹Muthosia, *Wawancara*, Kemlagi, 2 Juni 2016

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015 tergolong dalam partisipasi aktif, karena sudah dijelaskan dalam teori yang ada di BAB II partisipasi aktif itu yang ikut serta dalam kegiatan politik seperti menyalurkan suara dalam pilkada dan juga memiliki kesadaran politik dari masyarakat sudah terbangun. Sedangkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, itu dikarenakan jumlah yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas Kecamatan Kemlagi ada 84 orang tapi hanya ada 12 orang saja yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2015.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi dalam pilkada 2015, di antaranya adalah: faktor status sosial-ekonomi, faktor pengetahuan tentang calon dan juga faktor referensi politik. Faktor-faktor tersebut memiliki tingkatan berbeda. Tingkatan paling tertinggi adalah faktor referensi politik. Adanya referensi politik terjadi karena kurangnya rasa percaya diri untuk memilih atas keinginannya sendiri, yang akhirnya membuat para penyandang

disabilitas lebih mendengarkan referensi politik dari pihak yang lebih dipercayai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat lagi, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mojokerto seharusnya melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para penyandang disabilitas, bukan hanya kepada penyandang tuna netra. Meskipun jika dilihat secara kasat mata, tuna netra lebih membutuhkan bantuan dikarenakan keterbatasannya tapi penyandang disabilitas lainnya juga memerlukan sosialisasi agar partisipasi politik penyandang disabilitas lebih meningkat.
2. KPU Kabupaten Mojokerto sebaiknya melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi pada saat pemilihan.
3. Untuk penyandang disabilitas seharusnya lebih bisa meningkatkan kesadaran berpartisipasinya dalam pemilu yang diselenggarakan KPU Kabupaten Mojokerto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001.
- Dahl, Robert. A. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara Singkat. (Alih bahasa: A. Rohman Zainuddin)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2001.
- Effendi, M, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Gatara, A. A. Said dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- M, Elly, Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Peter, Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2007.
- Rahmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinas "Mixed Method"*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Sutjihati, Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Bandung: PT Refika Cipta Aditama, 2006.

Usman, Nurhamin Nahar, *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Zainul Daulay. “*Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*”. Makalah disajikan dalam Seminar Sehari di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang. 2014.

Internet:

Bahrul Fuad, <http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-ideologis/> “*Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis*,” Cak Fu (1 Juni 2015)

Berita Jatim,
http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/253617/melalui_perda_pemkot_mojokerto_jamin_hak_penyandang_disabilitas.html “Melalui Perda, Pemkot Mojokerto Jamin Hak Penyandang Disabilitas (19 Februari 2016)

Harian netral, <http://hariannetral.com/2014/09/politik-definisi-dan-pengertian-politik.html#> (30 Agustus 2016)

Herma Putra, <http://herma-putra.blogspot.co.id/2013/08/pengertian-politik-menurut-para-tokoh.html> (30 Agustus 2016)

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-referensi/>

Jelajah Internet, <http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html> (30 Agustus 2016)